
**PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELESTARIAN
BUDAYA DI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Oleh

Muhammad Yusuf Sulaeman¹⁾, Abdal²⁾, Engkus³⁾

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ¹ysulaeman14@gmail.com, ²abdal@uinsgd.ac.id, ³engkus@uinsgd.ac.id

Abstrak

Terjadi penurunan pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, sehingga stakeholder yang seharusnya terlibat dalam pelestarian kebudayaan juga menerima dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama stakeholder lainnya diluar unsur pemerintah dalam pelestarian kebudayaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses collaborative governance di dinas kebudayaan dki jakarta sudah cukup baik dengan selalu melibatkan stakeholder di setiap kegiatan maupun pertunjukkan seni budaya betawi. Namun dalam proses collaborative governance dilakukan masih belum cukup baik, dengan masih kurangnya komunikasi atau diskusi yang rutin dilakukan oleh dinas kebudayaan dki jakarta bersama stakeholder di luar unsur pemerintah. serta efek pandemi covid-19 yang terjadi menyebabkan banyak kegiatan pelestarian kebudayaan betawi terhenti dan tidak adanya anggaran yang memadai dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pelestarian seni budaya bersama stakeholder lainnya.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Stakeholder, Kebudayaan

PENDAHULUAN

Istilah ataupun sebutan *collaborative governance* ini timbul dikala terbentuknya perpindahan dari masa *Old Public Administration* (OPA) mengarah ke masa *New Public Management* (NPM). Setiap perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu yang bersamaan timbul perkembangan-perkembangan mengenai substansi yang menjadi objek penelitian dalam bidang pengetahuan baru. Dalam ilmu administrasi, misalnya, timbul perkembangan ilmu administrasi negara, ilmu administrasi niaga, ilmu organisasi, ilmu manajemen dan sebagainya. Demikian pula, ilmu administrasi pembangunan berkembang menjadi disiplin ilmiah tersendiri karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. (Engkus, 2018). Penyebutan *government* juga setelah itu berubah jadi *governance*. Pergantian

sebutan ini terjalin bertujuan buat mendemokrasi dari definisi administrasi publik, Administrasi Publik menurut pemikiran Nicholas Henry merupakan suatu perpaduan antara teori serta praktek, dengan tujuan mempromosikan uraian terhadap pemerintah mengenai hubungannya dengan warga yang diperintah, serta pula mendesak kebijakan publik supaya lebih responsif dengan kebutuhan publik. (Keban, 2014). Penggantian istilah *government* ke *governance* karena menggunakan istilah *government* penekanannya memiliki arti hanya akan lebih menekankan kepada sebuah institusi pemerintah, sementara jika menjadi istilah *governance* penekanannya akan lebih luas yang mana akan adanya keterlibatan lintas ataupun multi aktor yaitu pihak swasta dan masyarakat.

Dalam makna yang lebih luas *governance* bagi Chema dalam Keban, ialah sesuatu sistem

nilai, kebijakan, serta kelembagaan dimana urusan- urusan ekonomi, sosial, politik dikelola lewat interaksi warga, pemerintah, serta zona swasta (Keban, 2014). Ada 3 aktor yang begitu berpengaruh terhadap proses pemerintahan. Ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tiga aktor ini bekerja sama dalam proses jalannya pemerintahan. Yang mana pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang memonopoli jalannya pemerintahan, tetapi membutuhkan aktor lain karena keterbatasan kapasitas pemerintah. Sektor swasta dengan dukungan keuangannya juga dapat membantu pemerintah menjalankan proses pemerintahan. Dalam hal ini, pihak swasta tidak perlu khawatir dengan urusannya sendiri yang hanya mencari keuntungan tersendiri. Ini pula berarti kalau *governance* tidak cuma dalam konteks bernegara, melainkan *governance* pula diketahui juga mengaitkan *aktor private* serta *civil society* maupun aktor yang lainnya.

Dalam segi pengembangan dan pelestarian budaya daerah, pemerintah daerah juga ikut mengambil andil dan terlibat langsung dalam hal tersebut, di Ibu Kota Jakarta sendiri dengan budaya betawi yang sudah sangat melekat dengan kota ini. Menurut Shahab di Erwanto, suku betawi diperkirakan baru muncul saat abad ke-19 kisaran tahun 1815 hingga 1893. Asumsi ini mencuat dengan berdasarkan studi sejarah demografi masyarakat kota Jakarta yang diterbitkan Lance Castles yang merupakan seorang sejawaran Australia, ia percaya bahwa saat masa penjajahan oleh Belanda, pemerintahan saat itu rutin melakukan sensus penduduk dengan mengkategorikan berdasarkan etnisnya. (Erwanto, 2014). Betawi merupakan suku bangsa yang berada di Jakarta, yang mana betawi ini termasuk etnis campuran dengan kaya akan kebudayaan yang dimilikinya, mengenai suku betawi ini tersendiri, baik dalam kaitannya dengan adat istiadat dan kebudayaan. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwasannya suku betawi ini majemuk, yang mana artinya mereka berasal dari berbagai campuran suku bangsa dan asing. (Purbasari, 2010).

Dalam menjaga kelangsungan pelestarian budaya daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga wajib ikut andil dalam melestarikan kebudayaan betawi, hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang telah menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi bertujuan untuk: (a). melindungi, mengamankan dan melestarikan kebudayaan Betawi; (b). memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Betawi sebagai jati diri dan perlambangkebanggaan masyarakat Betawi dalam masyarakat yang multikultural; (c). meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Betawi; (d). meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan kebudayaan Betawi; (e). membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme; (f). membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan (g). mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku organisasi pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab dalam urusan kebudayaan, juga ikut berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya betawi. Tentunya dalam melestarikan sebuah kebudayaan dan ingin mendapatkan hasil yang maksimal itu tidak bisa dilakukan sendiri, perlunya keterlibatan multi-aktor dalam hal proses ini, karena kebudayaan juga sangat melekat dengan masyarakat yang merupakan sebagai wadah sebuah kebudayaan tersebut juga. Dengan adanya kolaborasi juga pastinya akan memudahkan dalam memecahkan sebuah permasalahan publik dan mencapai tujuan. Hal ini juga selaras dengan yang dijelaskan Emily R. Lai, yang menyatakan kalau kerja sama atau kolaborasi merupakan keikutsertaan bersama dengan upaya terkordinasi guna membongkar

permasalahan dengan bersama-sama. Interaksi kolaboratif sendiri diisyaratkan dengan terdapatnya suatu tujuan bersama, struktur yang simetris dengan perundingan tingkatan besar lewat interaktivitas serta terdapatnya silih ketergantungan antar satu sama lain. (Lai, 2011) karena sejatinya bahwa kerja sama atau kolaborasi merupakan upaya guna mengumpulkan bermacam pihak dengan kepentingan berbeda buat menciptakan suatu visi bersama, membangun konvensi menimpa sesuatu permasalahan, menghasilkan pemecahan buat permasalahan tersebut, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan guna menciptakan keputusan yang menguntungkan bagi seluruh pihak.

Seperti diketahui bahwa, bercampurnya budaya yang multikultural di Jakarta menyebabkan budaya asli Jakarta itu sendiri yaitu budaya betawi mulai luntur dari Kota Jakarta ini. Terlebih khusus untuk anak-anak muda Jakarta saat ini yang merupakan bagian dari etnis suku betawi, akan tetapi masih belum terlalu memahami mengenai adat kebudayaan sukunya sendiri. Semestinya kebudayaan itu melekat dengan kehidupan bermasyarakat seperti halnya yang dikemukakan oleh Liliweri yang menyatakan Kebudayaan ialah bagian pandangan hidup sekumpulan orang yang berupa perilaku, kepercayaan yang mereka terima secara tidak sadar dan diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya dengan melalui proses komunikasi. (Liliweri, 2002). Budaya betawi adalah budaya asli Kota Jakarta keberadaannya sedikit berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia, budaya betawi mudah dibedakan dengan budaya lain yaitu dari pergaulan, berkesenian, pakaian dan ragam hiasannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menjaga dan melestarikan budaya yang berkembang di Kota Jakarta. Tentunya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung memiliki tanggung jawab dan tugas terhadap pelestarian serta pengembangan kebudayaan betawi dapat berjalan dengan baik.

Terhadap pelestarian kebudayaan betawi di kota Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta juga memiliki salah satu sasaran tugas yaitu “Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan” yang meliputi a) Peningkatan Pertunjukan Seni Budaya Kreatif/Inovatif; b) Pelaku Seni Budaya yang Tampil pada Acara Budaya; dan c) Unsur Seni Budaya yang Dilestarikan. Capaian sasaran Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tergambar oleh diagram berikut,

Diagram 1. Presentase Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan



Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Diolah oleh Peneliti, 2020

Berdasarkan tampilan diagram yang telah diolah oleh peneliti dengan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, menunjukkan bahwa sasaran “Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan” pada bagian Peningkatan Pertunjukan Seni Budaya Kreatif/Inovatif bahwa realisasinya pada tahun 2018 mencapai presentase 152%, pada tahun 2019 mencapai presentase 100%, sedangkan pada tahun 2020 mencapai presentase 33,33%. Hasil presentase ini dengan berdasarkan jumlah

pertunjukan atau acara seni budaya yang telah diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Lalu untuk bagian Pelaku Seni Budaya yang Tampil pada Acara Budaya, realisasinya pada tahun 2018 mencapai presentase 110%, lalu tahun 2019 mencapai presentase 113%, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai presentase 26,19%. Hasil presentase ini dengan berdasarkan jumlah pelaku seni yang telah tampil pada acara kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk bagian Unsur Seni Budaya yang Dilestarikan pada tahun 2018 mencapai presentase 90%, lalu tahun 2019 mencapai presentase 210%, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai presentase 70%. Hasil presentase ini berdasarkan jumlah unsur budaya yang telah dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Dengan melihat fenomena penurunan sasaran terwujudnya pelestarian kebudayaan, tentunya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tidak dapat melakukannya sendiri, untuk demi mendapatkan hasil yang maksimal ini, perlunya keterlibatan multi-aktor atau dari beberapa pihak yang terlibat dalam pelestarian kebudayaan betawi ini sendiri, seperti ikut andil dalam perencanaan strategis yang akan dilakukan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan dan pengelolaan program maupun acara kebudayaan. Seperti halnya konsep *collaborative governance* yang memiliki karakteristik merupakan sebagai wadah forum yang diinisiasi oleh organisasi pemerintah, yang mana pembentukan forum ini dihadirkan oleh institusi pemerintahan sang pembuat kebijakan. Dengan keterlibatan aktor non-pemerintah yang menjadi bagian sebagai peserta. Peserta forum ini akan ada 3 komponen yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang telah disetujui bersama. Seluruh peserta forum ini pun terlibat dalam penentuan keputusan kolektif yang bukan hanya di konsultasikan dengan otoritas publik, dengan melihat tahapan proses kolaborasi seperti (a) Dialog antar-muka (*face to face dialogue*), (b)

Membangun kepercayaan (*trust building*), (c) Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*), (d) Pemahaman bersama (*shared understanding*), dan (e) Hasil Sementara. (Ansell & Gash, 2008). Hal ini juga selaras dengan rencana Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang ditampilkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2020, bahwa ingin melakukan kolaborasi antara pelaku seni dengan pemerintahan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai terhadap urusan kebudayaan. Karena memang pada dasarnya *Collaborative Governance* merupakan Model pemerintahan yang saling bekerja sama dengan melibatkan unsur aktor negara dan non-negara yang bekerja dari berbagai sektor guna mencapai tujuan bersama. Bingham menjelaskan makna *collaborative* yaitu keikutsertaan multi aktor yang saling bekerja sama guna untuk pencapaian tujuan, serta aktor-aktor ini hadir dari berbagai sektor tidak hanya cuma satu sektor. Lalu *governance* merupakan sebuah sistem pemerintahannya. (Bingham, 2010).

LANDASAN TEORI

Dalam hal ini peneliti tertarik dalam mengkaji bagaimana penerapan *Collaborative Governance* yang dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan serta faktor pendukung dan penghambat mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam Pelestarian Budaya Betawi.

Dan mengenai teori yang digunakan untuk penelitian ini yakni *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) yang menyatakan dimensi *collaborative governance* dalam pembentukan kolaborasi terdiri dari, (a) Dialog antar-muka (*face to face dialogue*), (b) Membangun kepercayaan (*trust building*), (c) Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*), (d) Pemahaman bersama (*shared understanding*), dan (e) Hasil Sementara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan

Sugiyono metode deskriptif ialah suatu metode yang menggambarkan atau memaparkan mengenai keadaan objek yang sedang diteliti dengan tergantung pada situasi dan kondisi dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan Sugiyono, pendekatan kualitatif merupakan sebuah mekanisme penelitian dengan berpedoman pada penilaian yang subjektif non-statistik atau non-matematis yang mana ukuran nilai yang dipakai bukan berupa angka bilangan skor, akan tetapi nilai kualitasnya. (Sugiyono, 2017). Metode penelitian deskriptif dipilih karena dapat memberikan gambaran penerapan *collaborative governance* terhadap pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta secara deskriptif dan obyektif.

Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini dengan observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Serta dalam pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah metode *purposive sampling* (sampling bertujuan). *Purposive sampling* menurut Sugiyono, adalah teknik perolehan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Waktu penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan dengan memperhatikan objek dan kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Serta teknik analisis data yang akan dipakai berupa, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Menarik Kesimpulan & Verifikasi (*Conclusion Drawing Verification*). Dengan uji validasi data dengan Teknik Triangulasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Proses kolaborasi antara stakeholder dalam pelestarian kebudayaan betawi di kota Jakarta, Pemerintah dengan melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan di kota Jakarta selaku stakeholder

utama dan dari sisi pemerintah mengupayakan adanya sosialisasi atau diskusi dialog dengan *stakeholder* lainnya dalam pelestarian kesenian budaya betawi, tidak hanya dari sisi eksternal. Dalam sisi internal Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi ke semua jajaran dalam dinas. Seperti jika ada pembaruan kebijakan atau peraturan tentang kesenian budaya betawi di Jakarta, seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, beserta turunannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 229 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan lalu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 11 tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi akan di sosialisasikan ke semua jajaran Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang harus mengetahui dan memahami hal tersebut. Sosialisasi dan dialog juga dilakukan terhadap stakeholder diluar pemerintah yang berkesinambungan terhadap kolaborasi yang dilakukan dalam pelestarian kebudayaan betawi di Jakarta, dari sisi Lembaga Kebudayaan Betawi, selaku Lembaga atau organisasi yang juga memiliki kewajiban terhadap pelestarian kebudayaan betawi di Jakarta, turut serta merasakan ajakan dialog maupun sosialisasi dari Dinas Kebudayaan. Dari sisi lembaga juga berkolaborasi dengan pemerintah melalui dinas kebudayaan terhadap dialog dan sosialisasi terhadap kebijakan baru mengenai pelestarian kesenian budaya Betawi di Jakarta terhadap sanggar-sanggar atau pelaku seni kebudayaan Betawi.

Selama situasi pandemic covid-19 ini memang dialog atau sosialisasi secara tatap muka atau fisik cukup sulit untuk dilakukan, akan tetapi hal itu tidak semena-mena menjadi penghambat proses dialog atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, proses sosialisasi ini tetap dilangsungkan secara *daring* dengan melalui aplikasi virtual meeting. Dari sisi Lembaga Kebudayaan Betawi ini selama situasi pandemic covid-19 turut serta melakukan dialog dan sosialisasi mengenai seni

kebudayaan Betawi secara *daring* dengan melalui aplikasi virtual meeting terhadap sanggar-sanggar seni kebudayaan Betawi yang ada di Jakarta. Maupun itu sosialisasi yang dilakukan dengan kolaborasi Bersama Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ataupun yang dilakukan langsung oleh Lembaga Kebudayaan Betawi. Sanggar-sanggar pun juga turut menerima dialog & sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Lembaga Kebudayaan Betawi, salah satunya Sanggar Setia Muda, yang merupakan salah satu Sanggar Kesenian Kebudayaan Betawi tertua di DKI Jakarta, dan telah aktif sejak tahun 1995 hingga saat ini, menurut perwakilan dari selaku Sanggar Setia Muda, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Lembaga Kebudayaan Betawi, tetap melangsungkan sosialisasi dan dialog mengenai kesenian budaya betawi terhadap sanggar-sanggar aktif yang ada di DKI Jakarta, selama pandemi covid-19 memang hal itu dilakukan secara *daring* dengan melalui aplikasi virtual meeting, akan tetapi semenjak covid-19 mulai mereda, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengupayakan sosialisasi dan dialog ini dilakukan secara tatap muka, Ketua Sanggar Yayasan Setia Muda menuturkan:

“Diskusi bersama dengan Dinas Kebudayaan ada dan lebih demi melebarkan sayap dari sisi seni kebudayaan, Kebetulan beberapa bulan yang lalu ada diskusi antara sanggar sanggar dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta beserta Lembaga Kebudayaan Betawi yang bertempat di Setu Babakan, yang berisi ajakan ayo bikin kreasi baru ayo bikin kreativitas yang baru, ayo kita bangkit sama-sama, saling komunikatif gitu”. (Wawancara, 5 Juli 2022, Sanggar Setia Muda)

Berdasarkan pernyataan tersebut Dinas Kebudayaan mengupayakan adanya dialog komunikatif dengan stakeholder unsur seni budaya betawi seperti sanggar untuk tetap aktif dan inovatif dalam pelestarian seni budaya betawi.

Dalam melangsungkan dialog atau diskusi ini Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memang

tidak menetapkan harus berapa kali hal ini dilakukan setiap tahunnya, Kepala Kordinator Urusan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menuturkan :

“Forum diskusi khusus selalu belum ada yang rutin, tapi selalu ada saja bahasan dengan lembaga atau ke sanggar-sanggar, dan juga bidang pengembangan kebudayaan memiliki grub whatsapp yang beranggotakan sanggar binaan dinas kebudayaan, jadi kita selalu diskusi selalu ajak pihak eksternal, terutama saat kita ingin membuat suatu kebijakan baru atau menelaah kebijakan itu apakah ini sudah pas atau ada revisi dengan melibatkan pendapat mereka”. (Wawancara, 19 April 2022, Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)

Dari pemaparan tersebut memang dialog atau diskusi dilakukan jika memang ada kebijakan atau peraturan dan program yang ingin dilakukan di setiap tahunnya. Dan semenjak pandemic covid-19 untuk kegiatan diskusi hanya dilakukan secara *daring* melalui *WhatsApp* grub dengan sanggar-sanggar atau lembaga terkait, **Membangun kepercayaan (*trust building*)**

Dalam pelestarian suatu seni budaya, peran stakeholder diluar pemerintah juga turut penting, dalam hal ini Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tidak hanya terhadap Lembaga atau sanggar kesenian budaya betawi, keikutsertaan atau pengambilan peran dari sisi akademisi juga terlibat dalam pelestarian kebudayaan betawi seperti kegiatan pameran kebudayaan dan webinar atau *talkshow* seni budaya Betawi.

Gambar 1. Webinar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta – Pelestarian Seni Budaya di Era Digital



Sumber : Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 2021

Keikutsertaan setiap sanggar-sanggar kesenian budaya Betawi dalam pelestarian kesenian budaya Betawi juga turut diperhatikan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Ketua Sanggar Yayasan Setia Muda menuturkan:

“Ajakan untuk ikut pentas seni budaya Betawi dari dinas itu ada, jadi gini ya dinas kebudayaan tau sanggar mana yang masih hidup atau aktif, sanggar yang masih bagus atau berjalan, nanti mereka akan coba komunikasikan diberitau tau tanggal pentasnya”. (Wawancara, 5 Juli 2022, Sanggar Setia Muda)

Berdasarkan pernyataan tersebut memang Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengupayakan untuk melibatkan sanggar-sanggar kesenian budaya Betawi untuk ikut serta dalam pelestarian kebudayaan betawi, terutama dalam hal Pertunjukan Seni Budaya dan Pelaku Seni Budaya yang Tampil Pada Acara Budaya.

Berbagai dukungan juga coba diberikan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk setiap stakeholder yang terlibat dalam pelestarian kesenian budaya betawi di Jakarta, Kepala Kordinator Urusan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menuturkan :

“Kalau dukungan supportif atau moral itu pasti untuk setiap stakeholder yang terlibat, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sendiri selalu menjajaki kolaborasi atau kerjasama apa yang bisa kita berikan untuk stakeholder ini dan apa yang mereka juga bisa berikan untuk Dinas Kebudayaan dan publik itu sendiri”. (Wawancara, 19 April 2022, Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)

Berdasarkan pernyataan ini memang pemerintah dengan melalui Dinas Kebudayaan berupaya untuk memberikan dukungan yang positif dan *supportif* untuk setiap *stakeholder* yang ikut serta dalam pelestarian kebudayaan, Ketua Bidang Pelestarian dan Pemanfaatan Lembaga Kebudayaan Betawi menuturkan :

“Lembaga Kebudayaan Betawi merupakan salah satu mitra dari kebudayaan untuk pemerintah. Kerjasama mitra ini tetap dilakukan sampai sekarang dan itu kita selalu berhubungan

baik karena kita saling membutuhkan. Dukungan moral dari pemerintah pun ada, karena kita memang bermitra dengan dinas kebudayaan itu memang ada anggaran atau hibah setahun sekali, kadang dua tahun itu sekali untuk Lembaga Kebudayaan Betawi ini”. (Wawancara, 1 Juli 2022, Kantor Lembaga Kebudayaan Betawi)

Berdasarkan pernyataan ini memang selain dukungan dalam segi moral, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga mengupaya dukungan berupa anggaran yang dapat diberikan terhadap *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pelestarian kebudayaan Betawi.

Keterlibatan semua stakeholder yang terlibat dalam pelestarian kebudayaan betawi juga memiliki tujuan yang sama. Di tengah kota Jakarta yang saat ini heterogen, masyarakat heterogeni ini adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Dan dari sisi pemerintah, Lembaga atau organisasi, sanggar atau pelaku seni budaya ini selalu berupaya bagaimana kebudayaan betawi tetap dapat dilestarikan dan diterima di tengah masyarakat kota Jakarta. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang mana pemerintah melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam pelestarian kesenian budaya betawi di kota Jakarta.

Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Adanya kolaborasi dengan *stakeholder* diluar pemerintahan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memiliki standar prosedur terhadap kolaborasi yang akan dilakukan. Dalam pertunjukkan atau pergelaran seni budaya dan pelaku seni budaya yang akan tampil, ada standar prosedurnya tersendiri. Kepala Kordinator Urusan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menuturkan :

“Kalau Dinas Kebudayaan memiliki standar prosedur di setiap kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal, kalau kita ingin menampilkan pelaku seni budaya seperti

sanggar-sanggar untuk tampil seni tari, musik gambang kromong dan sebagainya, kita sudah punya standar operasional prosedur untuk tarifnya dan prosedur pemilihan sanggar-sanggarnya juga ada kurasi atau prosedur yang kita lakukan dengan sesuai pertunjukkan seni yang akan kita tampilkan”. (Wawancara, 19 April 2022, Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap seni pertunjukkan yang akan tampil seperti seni tari, seni musik gambang kromong, dan sebagainya, telah ada standar tarif atau *budget* yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, hal ini juga berlaku terhadap pemilihan pelaku seni atau sanggar-sanggar yang akan tampil pada pertunjukkan seni budaya juga harus melewati proses standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Transparansi proses kolaborasi juga terjadi antara Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan Lembaga Kebudayaan Betawi, dari pemerintah kota Jakarta setiap kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya betawi akan melibatkan Lembaga Kebudayaan Betawi, dalam pertunjukkan seni budaya yang diusungkan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi, para pelaku seni atau sanggar-sanggar yang terlibat juga ada standar operasional anggaran yang mana anggaran ini juga yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta guna pelestarian kesenian budaya betawi. Dan setiap pelaku seni atau sanggar-sanggar yang ikut serta tampil dalam pertunjukkan seni budaya betawi, juga ada prosedur durasi tampil yang telah ditetapkan dan jumlah pertunjukkan bidang seni budaya dari setiap sanggar juga ada prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta maupun Lembaga Kebudayaan Betawi.

Selain transparansi anggaran dalam proses kolaborasi di setiap *stakeholder*, peran dan fungsi setiap *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi ini juga telah dipahami dengan baik, seperti Dinas Kebudayaan DKI Jakarta berperan seperti apa, Lembaga Kebudayaan Betawi

posisinya seperti apa dalam setiap kolaborasi, dan pelaku seni atau sanggar-sanggar juga berperan dengan sesuai fungsinya. Setiap nuansa seni budaya betawi yang ada atau terjadi di kota Jakarta, selalu ada peran Dinas Kebudayaan DKI Jakarta beserta Lembaga Kebudayaan Betawi, dan Para Pelaku Seni Budaya Betawi. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Kebudayaan Betawi menuturkan :

“Yang menarik dari kolaborasi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan Lembaga Kebudayaan Betawi dalam sisi pembangunan yang ada di kota Jakarta, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta itu nuansa budaya betawi sangat kental.. seperti pembangunan jembatan, trotoar dan lain sebagainya. itu ada adopsi nuansa betawi. Dan ini juga termasuk peran dari Lembaga Kebudayaan Betawi bukan hanya sebatas mengusulkan akan tetapi juga mengawal, dan memang hampir semua kegiatan di kota Jakarta ini yang berkaitan langsung dengan hal kebudayaan betawi pasti ada unsur Lembaga Kebudayaan Betawi. Baik itu kompetisi kebudayaan, ajang none Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi ikut turut andil dalam hal itu”. (Wawancara, 1 Juli 2022, Kantor Lembaga Kebudayaan Betawi)

Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap pembangunan fasilitas publik di kota Jakarta akan ada terselip nuansa budaya betawi didalamnya, dan dengan adanya nuansa budaya betawi terjadi berkat kolaborasi pemerintah kota Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan Lembaga Kebudayaan Betawi beserta Pelaku Seni Budaya Betawi, hal ini juga sama untuk setiap kegiatan kebudayaan betawi yang diselenggarakan di kota Jakarta.

Dalam proses kolaborasi dan hasil dari kolaborasi bersama *stakeholder* diluar unsur pemerintahan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga mengedepankan transparansi yang dapat diakses oleh publik secara luas dengan memanfaatkan media digital, setiap kolaborasi yang dilakukan akan di tampilkan dalam sosial media resmi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, dan di website resmi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta,

juga tersedia *press realese* setiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan dan dapat di akses oleh publik. Dalam mengusung proses kolaborasi terhadap sanggar-sanggar seni budaya yang ada di Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga berupaya melakukan pendataan sanggar-sanggar dengan berbasis digital.

Gambar 2. Tampilan Data Pencarian Sanggar dan Pelaku Seni



Sumber : Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 2021

Dengan adanya proses pendataan sanggar-sanggar dan pelaku seni budaya betawi di kota Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, sangat membantu terhadap proses kolaborasi untuk pertunjukkan seni budaya betawi yang akan melibatkan langsung sanggar-sanggar atau pelaku seni budaya betawi.

Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Setiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta akan terpampang dalam social media, dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga aktif membagikan konten mengenai kebudayaan betawi melalui platform sosial media, publik atau masyarakat juga peduli akan setiap konten yang di unggah oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan memberi saran atau masukan yang membangun. Hal ini menunjukkan bahwa public atau masyarakat kota Jakarta masih peduli terhadap kebudayaannya sendiri. Kepala Kordinator Urusan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menuturkan :

“Di sosial media kami ternyata publik peduli terhadap konten atau informasi yang di bagikan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, publik sering membagikan pertanyaan serta kritik yang membangun nah interaksi saling memahami itu timbul disitu, dan kami setiap ada kegiatan atau ingin melakukan hal lainnya kami

selalu terbuka jika stakeholder turut serta dalam berkolaborasi, karena kami juga paham bahwa kebudayaan ini tidak dapat berdiri sendiri dan butuh bantuan dari stakeholder yang lain”. (Wawancara, 19 April 2022, Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)

Berdasarkan pernyataan tersebut Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga selalu terbuka dan membuka ruang untuk setiap stakeholder yang ingin ikut dalam pelestarian kebudayaan betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta paham bahwa untuk pelestarian kebudayaan betawi ini tidak dapat dilakukan sendiri atau hanya melalui peran pemerintah, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang memang mempunyai tujuan yang sama dalam pelestarian kebudayaan betawi. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta turut memahami setiap *stakeholder* yang memiliki ambisi masing-masing terhadap pelestarian kebudayaan betawi di kota Jakarta.

Keterbukaan berbagi informasi juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, setiap ada audiensi di dengan stakeholder eksternal Dinas Kebudayaan DKI Jakarta selalu menempatkan posisinya seperti apa, dan melihat peluang apa yang bisa dibantu oleh pemerintah dalam audiensi yang akan berujung terhadap kegiatan pelestarian budaya betawi, Ketua Bidang Pelestarian dan Pemanfaatan Lembaga Kebudayaan Betawi menuturkan:

“Diskusi berbagi informasi juga kita lakukan antara Lembaga Kebudayaan Betawi dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, memang tidak rutin. Seperti pemerintah sedang riset untuk perlindungan budaya tak benda, nanti ini kita lakukan bersama-sama, di teliti juga oleh Lembaga Kebudayaan Betawi, dan legalitasnya akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta”. (Wawancara, 1 Juli 2022, Kantor Lembaga Kebudayaan Betawi)

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemahaman akan kompetensi setiap *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi pelestarian kebudayaan betawi dapat berjalan dengan cukup baik, dengan memahami kemampuan dan peran masing-masing.

Pemahaman gotong royong atau saling membantu juga terjadi di setiap *stakeholder* yang ingin melakukan kolaborasi, setiap pertunjukan seni budaya betawi baik itu di dalam kota Jakarta, atau di luar kota Jakarta. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tidak segan untuk melibatkan Lembaga Kebudayaan Betawi dalam membantu untuk pemilihan atau kualifikasi sanggar atau pelaku seni yang dapat terlibat dalam pergerlarian seni budaya betawi tersebut, Dalam pergelaran pertunjukkan kesenian budaya betawi yang di rancang oleh Lembaga Kebudayaan Betawi juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dengan melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, . Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Kebudayaan Betawi menuturkan :

“Pemahaman gotong royong itu ada, seperti contohnya saat perayaan ulang tahun kota Jakarta kami akan melakukan pertunjukkan dengan pihak lain juga, karena Lembaga Kebudayaan Betawi tidak memiliki anggaran akhirnya kita minta ke Dinas Kebudayaan, akhirnya hal tersebut di terima lalu kemudian kita kerjakan”. (Wawancara, 1 Juli 2022, Kantor Lembaga Kebudayaan Betawi)

Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memahami akan hal yang ingin coba dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi, dan pemerintah juga turut ikut membantu dengan memberikan anggaran yang sesuai untuk pergelaran seni budaya betawi tersebut, dan sanggar atau pelaku seni juga akan lebih diberdayakan dengan beragaramnya pertunjukan seni budaya yang dilakukan.

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga memberikan ruang untuk sanggar atau pelaku seni jika ingin melakukan Latihan pertunjukkan dengan memanfaatkan fasilitas publik yang ada, seperti gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB). Kepala Kordinator Urusan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menuturkan :

“Kami memahami potensi setiap sanggar atau pelaku seni ini, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta itu menaungi adanya pusat pelatihan seni

budaya itu di lima kota Jakarta, dengan pusat pelatihan seni budaya ini sanggar atau pelaku seni punya potensi untuk mengembangkan seni budaya lebih baik lagi, dan melestarikan budayanya kita bisa tuh kolaborasi dengan menggunakan gedung ini juga untuk seni menari dan hal lainnya karena memang pusat pelatihan seni budaya itu bisa juga untuk menjadi ruang kolaborasi”. (Wawancara, 19 April 2022, Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)

Berdasarkan pernyataan tersebut sanggar atau pelaku seni diberikan ruang publik untuk mereka lebih bisa berekspresi dan mengembangkan seni kebudayaan yang mereka geluti, dengan memanfaatkan Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) yang ada di seluruh kota Provinsi DKI Jakarta yang di sediakan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta selain menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan seni budaya juga dapat menjadi ruang kolaborasi antar sanggar dan pelaku seni yang terlibat dalam pelestarian kesenian budaya betawi.

Hasil Sementara.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, dalam segi pelestarian kebudayaan sangat memberikan dampak yang cukup besar. Dari sisi anggaran ikut serta terkena imbas yang mengharuskan anggaran Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk hal pelestarian kebudayaan turut di pangkas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kordinator Urusan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menuturkan:

“Setiap pelestarian kebudayaan memerlukan anggaran yang besar, selama pandemic covid-19 datang anggaran kita di potong semua, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana untuk dalam pemulihan covid-19 ini, jadi semua kegiatan seni budaya kita semua itu terhenti, tadinya sudah ada mau berbagai kegiatan festival kebudayaan dengan melibatkan pihak eksternal ya dan memerlukan anggaran untuk kolaborasi dengan mereka, jadi terhenti”. (Wawancara, 19 April 2022, Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)

Menurut pernyataan tersebut imbas dari anggaran Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang di pangkas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi penghambatnya dalam hal pelestarian kebudayaan betawi yang mengakibatkan menurunnya Pertunjukkan Seni Budaya, Pelaku Seni Budaya yang Tampil, dan Unsur Seni Budaya yang Dilestarikan.

Imbas pandemi covid-19 turut serta menciptakan pembaharuan dalam pelestarian kebudayaan betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta turut mengusahakan setiap kegiatan pelestarian kebudayaan betawi tetap dilaksanakan secara daring atau virtual dengan memanfaatkan lini sosial media Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, pemerintah tetap mencoba untuk memfasilitasi sanggar dan pelaku seni budaya betawi untuk tetap bisa tampil dan melestarikan kesenian budaya betawi.

Gambar 3. Sanggar Setia Muda Memperkenalkan Seni Musik Gambang Kromong



Sumber: Youtube Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 2021

Sanggar Setia Muda ikut andil dalam melestarikan kesenian budaya betawi, dengan memperkenalkan Seni Musik Gambang Kromong dan kegiatan sanggar di tengah situasi pandemi covid-19 dengan memanfaatkan atau melalui lini sosial media Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Setiap kegiatan pertunjukkan seni budaya betawi yang dilakukan secara daring atau virtual turut serta di unggah dalam lini youtube Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, agar publik juga dapat tetap melihat pertunjukkan seni budaya di masa pandemi covid-19.

Setiap kegiatan kolaborasi antar *stakeholder* juga turut dirasakan

kemanfaatannya, saat ada kegiatan pertunjukkan seni budaya betawi dengan Lembaga Kebudayaan Betawi turut dilibatkan dan serta memberikan ruang untuk tanggung jawabnya dalam pelestarian kebudayaan betawi. Sanggar dan Pelaku Seni turut diberikan ruang untuk berekspresi dengan menampilkan berbagai macam kesenian budaya betawi yang digelutinya, Ketua Sanggar Setia Muda menuturkan :

“Manfaat selain anggaran yang diterima oleh kami, selama pandemi saya tetap bisa tampil walau pertunjukannya secara virtual dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta”. (Wawancara, 5 April 2022, Sanggar Setia Muda)

Berdasarkan pernyataan tersebut sanggar dan pelaku seni turut merasakan manfaatnya dengan tetap bisa menampilkan dan melestarikan kesenian budaya betawi secara virtual atau daring.

Dalam segi permasalahan kesenian budaya betawi di kota Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta turut serta menggandeng stakeholder lain seperti Lembaga Kebudayaan Betawi dan Sanggar atau Pelaku Seni untuk ikut serta berkolaborasi dalam pemecahan masalah tersebut. Sama halnya saat perumusan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), dalam hal ini Dinas Kebudayaan Betawi turut serta menggandeng Lembaga Kebudayaan Betawi, Sanggar dan Pelaku Seni untuk ikut andil dalam perumusan hal tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta turut serta mencatatkan karya budaya betawi untuk dicatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melindungi dan melestarikan budaya betawi. Setiap produk budaya Betawi yang telah mendapatkan pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), dapat melanjutkan proses pencatatan Hak Kekayaan Intelektual-nya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Beberapa Warisan Budaya Tak Benda yang di usulkan untuk pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, (1) Gambus Betawi, (2) Pencak Silat

Gerak Saka, (3) Pencak Silat Sekojor, (4) Pencak Silat Sabeni Tanabang, (5) Sohibul Hikayat, (6) Pencak Silat Troktok, (7) Pencak Silat Pusaka Djakarta, (8) Pencak Silat Mustika Kwitang, (9) Pencak Silat Gamblong. (dinaskebudayaan.jakarta.go.id, 2022)

Kegiatan pertunjukkan atau program seni budaya betawi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta beserta stakeholder lainnya juga turut dirasakan manfaatnya oleh publik secara umum, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Kebudayaan Betawi menuturkan

“Banyak hal program yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam hal kebudayaan saya pikir sudah sangat dirasakan baik oleh masyarakat sebagai penggunaannya maupun masyarakat secara umum, seperti palang pintu, ondel-ondel, dan macam seni budaya lainnya sekarang banyak masyarakat yang kenal”. (Wawancara, 1 Juli 2022, Kantor Lembaga Kebudayaan Betawi)

berdasarkan pernyataan tersebut upaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya betawi secara luas dengan melibatkan *stakeholder* lainnya yang turut berkolaborasi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Serta banyak setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak di kota jakarta selalu menempatkan adanya suasana budaya betawi dalam penyelenggaraannya tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam pelestarian kebudayaan sudah cukup baik, dengan (1) Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam proses dialog dapat dilangsungkan dengan cukup baik dengan menggandeng *stakeholder* seperti Lembaga Kebudayaan Betawi dan sanggar-sanggar serta pelaku seni untuk ikut

diskusi dalam pelestarian kebudayaan betawi, (2) Dalam membangun kepercayaan antara seluruh *stakeholder* dengan saling mendukung satu sama lain demi tercapainya tujuan bersama, (3) Dalam hal komitmen pada proses kolaborasi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta selalu menggandeng seluruh *stakeholder* untuk setiap pertunjukan seni budaya maupun setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. (4) Segi pemahaman bersama oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang terbuka akan segala informasi dan pemahaman saling membantu untuk setiap *stakeholder* yang terlibat dalam pelestarian kebudayaan. (5) Melihat hasil yang diterima dengan adanya pandemi covid-19 datang sehingga menimbulkan beberapa masalah yang ada terhadap pelestarian kebudayaan seperti adanya pemotongan anggaran dalam Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk setiap kegiatan pelestarian kebudayaan dan seluruh kegiatan pelestarian kebudayaan yang tidak dapat dilangsungkan secara tatap muka atau fisik, akan tetapi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tetap berupaya untuk setiap kegiatan ataupun pertunjukan seni budaya tetap dapat tampil, dan pelaku seni budaya tetap bisa berekspresi serta menampilkan setiap seni budaya yang mereka geluti dengan dilakukan secara daring atau online dengan memanfaatkan lini sosial media yang dimiliki Dinas Kebudayaan DKI Jakarta seperti youtube dan Instagram. Ouput dari kegiatan kolaborasi pelestarian kebudayaan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan Lembaga Kebudayaan Betawi dan sanggar-sanggar maupun pelaku seni dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dengan lebih memahami berbagai macam seni kebudayaan betawi yang terus berkembang di kota Jakarta.

Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti untuk membantu menanggulangi beberapa masalah proses *collaborative governance* dalam Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, yaitu dengan (1) Dinas Kebudayaan DKI Jakarta harus secara rutin atau terjadwal dalam dialog maupun diskusi

dengan *stakeholder* diluar pemerintah, tidak hanya melakukan dialog atau diskusi disaat ingin melakukan sebuah kegiatan pelestarian kebudayaan maupun kolaborasi. (2) Lalu untuk kolaborator dari sisi sanggar maupun pelaku seni, dengan banyaknya jumlah sanggar maupun pelaku seni budaya di kota Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta harus dapat lebih memperhatikan dan memberi ruang untuk semua sanggar-sanggar maupun pelaku seni ini untuk ikut serta dalam pelestarian kebudayaan betawi. Dan (3) diharapkan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dapat lebih memanfaatkan dan mengeksplorasi sosial media atau media digital dalam pelestarian kebudayaan betawi untuk lebih menarik banyak lagi partisipasi maupun pengetahuan publik terhadap seni kebudayaan betawi di kota Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Keban, T. Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta, Grava Media.
- [2] Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- [3] Bingham, L. B. (2010). The Next Generation of Administrative Law : Building the Legal Infrastructure for Collaborative Governance. *Wisconsin Law Review*, 297.
- [4] dinaskebudayaan.jakarta.go.id. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020*. <https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/news/2021/10/LAKIP-Disbud-2020-3>
- [5] Erwanto, H. (2014). Etnis Betawi: Kajian Historis. *Jurnal Penelitian Sejarah*, 6(1).
- [6] Engkus, E. (2018). Perspektif Administrasi Pembangunan: Menuju Ke Arah Konvergentif. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 190-201.
- [7] Lai, E. R. (2011). *Collaboration: A Literature Review*. London. Pearson Publisher.
- [8] Liliweri, M. S. (2002). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta, PT LKIS Pelangi Aksara.
- [9] Jakarta.bpk. (n.d.). *Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi*. <https://jakarta.bpk.go.id/peraturan-daerah-no-4-tahun-2015-tentang-pelestarian-kebudayaan-betawi/>
- [10] Purbasari, M. (2010). Indahnya Betawi. *Jurnal Humaninora*, 1(1).
- [11] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, CV Alfabeta.
- [12] dinaskebudayaan.jakarta.go.id. (2022). *Pemprov DKI Usulkan 9 Karya Budaya Betawi Dalam Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal*. <https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/news/2022/03/Pemprov-DKI-Usulkan-9-Karya-Budaya-Betawi-Dalam-Pencatatan-Kekayaan-Intelektual-Komunal>, diakses tanggal 3 Juni 2022

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN